

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
MELALUI KEGIATAN HUTAN RAKYAT DI DESA KALISIDI
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

Dinda Gitahapsari, Amni Z. Rahman

**Jurusan Administasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Salah satu masalah yang masih dihadapi di Indonesia saat ini adalah degradasi lahan. Pemerintah memberlakukan program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi dan produktivitas lahan yang mengalami kerusakan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan implementasi program rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan hutan rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan, observasi dan dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Menhut-II Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu persiapan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn, menunjukkan bahwa faktor pendukung yaitu standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, disposisi pelaksana, kondisi ekonomi. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya, kondisi sosial dan politik. Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok tani, melakukan rekrutmen penyuluh kehutanan lapangan, perlunya Perda mengenai pengelolaan hutan rakyat, meninjau kembali aturan penatausahaan hasil yang berasal dari hutan rakyat.

Kata Kunci : Implementasi, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Hutan Rakyat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Namun dengan luasan hutan tropis yang dimiliki, Indonesia juga menghadapi tantangan dan masalah dalam mengelola hutan dan lahan. Tantangan dan masalah terhadap hutan dan lahan tersebut harus diantisipasi dan ditangani dengan benar, karena keberhasilan dalam mengelola hutan dan lahan saat ini akan menentukan masa depan kita dan generasi mendatang.

Salah satu tantangan dan masalah yang dihadapi yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah menurunnya kualitas lahan yang berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas lahan. Dimana menurunnya produktivitas lahan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya lahan kritis.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya dengan diberlakukannya program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai kelanjutan

dari upaya-upaya rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penerapan teknik konversi tanah dan kegiatan penanaman RHL. Salah satu kegiatan dalam penanaman RHL yaitu penghijauan, yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan/atau untuk meningkatkan produktivitas lahan. Salah satu kegiatan dalam penghijauan tersebut adalah pembangunan hutan rakyat.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi sumber daya hutan dan lahan, serta

posisi Kabupaten Semarang yang strategis di jalur perdagangan dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Khususnya untuk sektor kehutanan, dengan sumber daya hutan yang dimiliki dan berada pada jalur yang strategis membuat akses dalam perdagangan hasil pengolahan hutan lebih mudah. Akibatnya, tuntutan akan eksploitasi hutan meningkat dan menyebabkan kerusakan hutan. Untuk meningkatkan usaha penghijauan dan menurunkan luasan lahan kritis di Kabupaten Semarang, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan program rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan hutan rakyat.

Salah satu sasaran lokasi program rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan hutan rakyat di Kabupaten Semarang yaitu Desa Kalisidi yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat. Luas hutan rakyat di Desa Kalisidi adalah sebesar 140 Ha. Desa Kalisidi memiliki kemiringan lahan yang curam yaitu sekitar 25-45%. Setelah dilakukannya program ini, membawa perubahan untuk para petani di Desa Kalisidi dalam pemanfaatan lahan yang berpengaruh

terhadap peningkatan pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Di samping perubahan yang terjadi, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan hutan rakyat di Desa Kalisidi antara lain penebangan tanaman keras tidak diimbangi dengan penanaman kembali dan petani di sana menggunakan sistem tebang butuh dimana petani melakukan penebangan pohon sebelum masak tebang, dimana sistem tebang butuh seperti itu tentu tidak memperhatikan kaidan konservasi dan berpengaruh terhadap mutu kualitas kayu. Selain itu terdapat masalah peralihan fungsi tanah pertanian atau sawah menjadi lahan kering atau permukiman, pada saat musim penghujan sering terjadi longsor karena kondisi wilayah Desa Kalisidi yang memiliki kemiringan yang tajam, serta masih ditemukan petani yang sistem penanaman tanamannya masih tradisional dan masa tanamnya tidak beraturan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi Implementasi Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi Implementasi Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Thomas R. Dye (dalam Irfan Islamy, 2003:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. James Anderson (dalam Budi Winarno, 2014:21) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan yang penting untuk dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Udoji (dalam Solichin Abdul Wahab 2012:126) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Di dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi. Model implementasi perlu dipakai dalam melakukan

sebuah penelitian sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Salah satu model implementasi kebijakan yaitu model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model dari Van Meter dan Van Horn dimana model ini memiliki 6 (enam) faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Enam faktor tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, disposisi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Standar dan sasaran kebijakan berkenaan dengan acuan atau pedoman yang digunakan dalam implementasi program dan sasaran dari program tersebut apakah sudah jelas sehingga tidak terjadi multi-interpretasi antara pelaksana kebijakan.

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan program baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu juga ketersediaan sumber daya anggaran

dan sumber daya fasilitas untuk mendukung implementasi program.

Komunikasi antar organisasi berkenaan dengan proses komunikasi yang dilakukan antar pelaksana program dan kelompok sasaran. Selain itu juga mengenai koordinasi yang dilakukan oleh badan-badan pelaksana yang terlibat dalam implementasi program.

Karakteristik badan-badan pelaksana berkenaan dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh masing-masing badan pelaksana program. Serta pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan pelaksana program.

Disposisi pelaksana berkenaan dengan respon atau tanggapan para pelaksana program, pemahaman yang dimiliki oleh para pelaksana program, serta nilai-nilai yang dijadikan acuan terkait dengan program.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik berkenaan dengan sejauh mana lingkungan eksternal mendukung implementasi program dengan melihat kondisi perekonomian masyarakat di Desa Kalisidi yang dipengaruhi oleh

implementasi program yang bersangkutan, kondisi sosial dan kondisi politik di Desa Kalisidi yang dapat memengaruhi implementasi program.

Pelaksanaan kegiatan hutan rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi beberapa kegiatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai implementasi program dan melihat apakah program tersebut telah berjalan dengan baik dari pelaksanaan:

1. Persiapan
Persiapan berkenaan dengan bagaimana penyiapan kelembagaan, penataan areal tanaman, serta pembuatan sarana dan prasarana.
2. Penanaman
Penanaman berkenaan teknik penanaman yang dikembangkan.
3. Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan tanaman berkenaan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan yang meliputi komponen pekerjaan yaitu

penyiangan, pendangiran, perlindungan dan pengamanan tanaman.

D. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi dan fakta-fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan dukungan informasi yang ada terkait dengan Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sehingga lokasi atau tempat penelitian berdasarkan fokus penelitian adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Ungaran Barat dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Semarang. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive*. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang, Staf Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Penyuluh Lapangan Desa Kalisidi Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Petani Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain catatan lapangan, sumber data tertulis dan rekaman. Sumber data dalam penelitian ini dapat

dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2010:29). Pendekatan studi kasus ini dilakukan untuk mendeskripsikan program rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan hutan rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan melihat proses, aktivitas-aktivitas dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut dengan lebih mendalam.

Di dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu merupakan pengecekan data yang dilakukan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Di dalam penelitian ini

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan teknik yang sama melalui sumber yang berbeda-beda (Sugiyono, 2013:274).

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

1. Persiapan

Kegiatan persiapan telah dilakukan, hal tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya 10 (sepuluh) kelompok tani di Desa Kalisidi. Namun belum terlaksana dengan optimal karena masih terdapat masalah kelembagaan dan administrasi pada semua kelompok tani di Desa Kalisidi.

2. Penanaman

Kelompok tani di Desa Kalisidi menggunakan pola penanaman tumpang sari dan agroforestri. Sedangkan teknik penanaman

dilakukan dengan sistem cemplongan. Jenis komoditas pertanian di Desa Kalisidi antara lain yaitu padi, jagung, ubi jalar, singkong, kacang, cabai. Untuk komoditas perkebunannya antara lain yaitu cengkeh, kopi, kelapa, kapulogo, jahe. Sedangkan komoditas kehutannya antara lain yaitu sengon, albisia, mahoni, suren, waru, jabon.

3. Pemeliharaan Tanaman

Kelompok tani di Desa Kalisidi telah melakukan ketiga kegiatan tersebut dalam melakukan pemeliharaan tanaman. Namun di dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal, hal tersebut ditunjukkan dengan masih kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan bor kayu, masih kurangnya distribusi obat untuk tanaman dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat untuk tanaman, serta masalah penyesuaian waktu yaitu penyuluh mengalami kesulitan dalam menyesuaikan waktu mereka dengan para petani.

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas untuk dijadikan acuan agar pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sedangkan sasarannya yaitu lahan milik masyarakat.

2. Sumber Daya

Jumlah pelaksana kebijakan telah mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk pelaksana dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang. Sedangkan jumlah penyuluh kehutanan lapangan dari Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Ungaran Barat masih kurang.

Ketersediaan sumber daya anggaran masih kurang, karena untuk sektor kehutanan hanya ditunjang 10% dari Dana APBD dan itu masih dibagi untuk seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Semarang. Ketersediaan sumber daya fasilitas juga masih kurang dalam pendistribusian obat untuk tanaman.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Proses komunikasi telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang melalui para penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Ungaran Barat. Kemudian para penyuluh melakukan sosialisasi kepada kelompok tani melalui penyuluhan dan pendampingan kegiatan. Kedua badan pelaksana tersebut juga telah melakukan koordinasi yang baik dengan para *stakeholders*.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana
Karakteristik badan-badan pelaksana ditunjukkan dengan masing-masing badan pelaksana telah memiliki struktur organisasi, sehingga tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksana terbagi jelas dan tidak terjadi tumpang tindih. Badan-badan pelaksana tersebut juga melakukan pengawasan dengan melakukan monitoring evaluasi pada setiap akhir penanaman dan kunjungan lapangan.
5. Disposisi Pelaksana
Para pelaksana kebijakan mendukung pelaksanaan program, memiliki pemahaman yang baik mengenai program serta memiliki preferensi nilai yang digunakan dalam pelaksanaan program.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Adanya program ini dapat berkontribusi dalam menambah pendapatan petani dengan penanaman agroforestri, sehingga kondisi ekonomi menjadi faktor pendukung dalam program ini.

Keberadaan pengepul kayu yang masuk ke Desa Kalisidi dan perubahan peraturan mengenai penatausahaan hasil yang berasal dari hutan rakyat dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Desa Kalisidi, karena hal tersebut dapat menjadi ancaman karena dengan masih adanya sistem tebang butuh, kemudian para petani tidak perlu melakukan izin penebangan, maka mereka akan menjual langsung kepada para pengepul kayu. Disebut ancaman karena para pelaksana kebijakan tidak dapat melakukan kontrol terhadap besarnya kegiatan penebangan yang dilakukan oleh para petani.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi program ini telah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya ketiga kegiatan yaitu persiapan, penanaman dan pemeliharaan tanaman yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor pendukung implementasi program ini yaitu standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, disposisi pelaksana. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumber daya, kondisi sosial dan kondisi politik.

B. Saran

1. Sebaiknya melakukan penguatan kelembagaan dengan memberikan pelatihan kepada kelompok tani.
2. Melakukan penambahan penyuluh kehutanan yang berkompeten di bidangnya dengan mengadakan rekrutmen penyuluh kehutanan lapangan.

3. Meningkatkan pengawasan untuk menghindari penebangan yang tidak terkontrol yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan lapangan, serta meninjau kembali peraturan penatausahaan hasil yang berasal dari hutan rakyat.
4. Perlu adanya suatu Peraturan Daerah mengenai pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.G. Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.
- Aryadi, Mahrus. 2012. *Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta:Jakarta

- Creswell, W.J. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods (Edisi Ketiga, Terjemahan Achmad Fawaid)*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Gulo, W. 2005. *Metodologi Penelitian Cetakn Keempat*. PT Grasindo:Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua*. Erlangga:Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media:Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2003 (cetakan keduabelas). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Nawawi, Ismail.2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara:Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta:Bandung.
- Utari, Ayu Dewi. 2012. *Penerapan Strategi Hutan Rakyat, Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*. Cakrawala:Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia:Malang.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Buku Seru:Jakarta.
- Peraturan Perundangan:**
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 21/KemenLHK-II Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak
- Dokumen:**
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2014. *Data Strategis Kabupaten Semarang*. Kabupaten Semarang:BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2015. *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2015*. Kabupaten Semarang:BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2015. *Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka 2015*. Kabupaten Semarang:BPS

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Buku Statistik Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2013*. Semarang:Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Website:

Hutkabsemarang. 20 Agustus 2014. Pembangunan Kehutanan Kabupaten Semarang. Dalam <http://kehutanankabsemarang.blogspot.com/2014/08/pembangunan-kehutanan-kabupaten-semarang.html>. Diakses pada tanggal 8 November 2014

Indriati Dewi. 23 Juli 2014. Degradasi Lahan dan Dampaknya Bagi Kehidupan. Dalam <http://slideshare.net/IndriatiDewi/degradasilahandandampaknyaterhadapkehidupan>. Diakses pada tanggal 8 November 2014

<http://birohumas.jatengprov.go.id/userfile/file/lkpj2013/bab4urusanpilihan.pdf>. Di akses pada tanggal 9 November 2014